

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinamika tenaga kerja luar negeri Indonesia yang telah berkembang secara kompleks ternyata tidak lepas dari serangkaian sejarah yang panjang. Bagi pihak Indonesia sendiri keberadaan TKI memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional, pembangunan daerah ataupun kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang tempat TKI itu sendiri tinggal.

- perkembangan ketenagakerjaan luar negeri ternyata berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di daerah-daerah yang selama ini menjadi penyalut utama TKI.
- pemerintah berupaya membangun institusi untuk dapat memberikan perlindungan dan menempatkan TKI. Disinilah BNP2TKI menjadi inistitusi yang begitu penting dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia.
- Pada periode 2009-2013 merupakan masa penting bagi dinamika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri. Pada periode tahun tersebut sektor buruh migran (TKI) masih menjadi sektor unggulan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga dengan lebih baik. Pada kenyataannya para TKI dihadapkan pada berbagai

persoalan, baik secara teknis, administratif ataupun persoalan yang lebih parah, diantaranya kekerasan hingga penyiksaan.

- Pada tahun 2009-2013 berbagai persoalan TKI masih menjadi isu yang mengemuka dan ternyata persoalan ini belum dapat diselesaikan secara mendasar oleh pemerintah Indonesia. Persoalan-persoalan ini, yaitu kekerasan ternyata berkaitan dengan posisi pekerja yang dianggap rendah.
- pelanggaran hak dari para TKI, meliputi pengurangan atau penolakan pembayaran upah kepada para TKI, pekerjaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan perjanjian dan kasus PHK secara sepihak.
- Persoalan-persoalan tersebut telah menjadi mata rantai problematika TKI yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, persoalan-persoalan tersebut dari tahun ke tahun juga menunjukkan tren peningkatan. Inilah yang menjadi titik temu antara peran BNP2TKI.

Berbagai persoalan tentang ketenagakerjaan luar negeri seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Problematika tentang ketenagakerjaan luar negeri ternyata berkaitan dengan lemahnya program pelayanan dan perlindungan TKI yang begitu lemah. Disinilah kemudian insititusi BNP2TKI dapat menangani berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari *institutional setting*.

Peran BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan TKI diwujudkan dalam beberapa peran, masing-masing yaitu fungsi publikasi (promosi) sebagai bagian dari upaya preventif, serta fungsi advokasi dan mediasi, dimana upaya ini dijalankan untuk mendampingi dan mengambil alih persoalan-persoalan yang terjadi. Selain itu, dalam memperkuat kapasitasnya, BNP2TKI juga menjalankan kerjasama luar negeri dengan beberapa negara tujuan TKI. Upaya ini dimaksudkan agar tercipta pemahaman antara pemerintah Indonesia (BNP2TKI) dengan otoritas negara-negara yang menjadi tujuan. Dengan demikian maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Indonesia sebagai negara dunia ketiga mendorong masyarakatnya untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik salah satunya dengan bekerja di luar negeri.
- b. Tenaga kerja luar negeri Indonesia ternyata menjadi tolok ukur perkembangan sosial-ekonomi di negara ini yang bukan hanya memberikan keuntungan bagi para pekerja, namun juga pemasukan terbesar devisa negara.
- c. Persoalan mengenai tenaga kerja luar negeri menjadi hal yang sangat kompleks, sehingga diperlukan berbagai inisiatif dan penanganan yang sistematis dan terarah yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan BNP2TKI.
- d. Peran BNP2TKI ternyata memiliki peranan yang sangat penting melindungi para tenaga kerja Indonesia. Dalam mendukung program ini, BNP2TKI

menerapkan fungsi publikasi, advokasi dan mediasi, serta membangun kerjasama luar negeri yang efektif.

- e. Peran BNP2TKI melalui fungsi publikasi, advokasi dan mediasi, serta membangun kerjasama luar negeri yang efektif ternyata dapat membawa penanganan masalah perlindungan TKI ke arah yang lebih baik, meskipun pada kenyataannya belum dapat menjadi solusi ideal yang bersifat mendasar di Indonesia.

2. Saran

Pada penelitian ini penulis dapat memberikan saran bagi para akademisi dalam penelitian-penelitian selanjutnya bahwa persoalan tentang kekerasan dan pelanggaran hak TKI ternyata berkaitan dengan rendahnya posisi tawar (*bargain position*) dari masyarakat Indonesia sendiri sebagai tenaga kerja luar negeri. Untuk itu, perlu program-program terencana yang bersifat jangka panjang sebagai pembekalan bagi para TKI sebagai *agent of change*. Program ini dihadapkan dapat mendukung program-program pemerintah yang telah ada sebelumnya.

Kemudian saran selanjutnya berkaitan dengan adanya faktor pendorong (*push factor*), dimana kemiskinan dan keterbelekangan pada daerah-daerah pemasok TKI menjadi persoalan penting yang belum dapat teratasi oleh pemerintah Indonesia.

Untuk itu, perlu program-program pemerataan pembangunan dimana hal ini berhubungan dengan akar persoalan ketenagakerjaan Indonesia itu sendiri.